



RENCANA KERJA TAHUN 2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026. Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 merupakan tahapan kelima dari 6 (enam) tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami sadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik berkenaan dengan substansi maupun penyajian dokumen ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan dokumen Renja BKPSDMD lebih baik.

Pangkalpinang, OKTOBER 2025

PLT. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika Penyusunan.....	I-8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD.....	II-16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD.....	II-22
2.4 Review Terhadap RKPD.....	II-26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD.....	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	IV-1
4.1 Rencana Kerja	IV-1
4.2 Pendanaan.....	IV-4
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1 Catatan Penting.....	V-1
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	V-2

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan Pencapaian Renstra BKPSDMD s.d. Tahun 2025 (tahun berjalan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-2
Tabel 2.2	Jumlah ASN BKPSDMD Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin pertanggal 31 Desember 2024.....	II-18
Tabel 2.3	Jumlah ASN BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan pertanggal 31 Desember 2024.....	II-19
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama BKPSDMD.....	II-19
Tabel 2.5	Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama BKPSDMD.....	II-20
Tabel 2.6	Capaian Indikator Program (Outcome).....	II-21
Tabel 2.7	Review Terhadap RKPd tahun 2026 Prov. Kep. Bangka Belitung.....	II-27
Tabel 2.8	Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Prov. Kep. Bangka Belitung.....	II-35
Tabel 3.1	Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD dan Tujuan Sasaran BKPSDMD Beserta Target Pada Renja Tahun 2026.....	III-3
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	IV-5

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.....	I-3
Gambar 1.2	Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-17

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana uraian tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Renstra PD selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BKPSDMD 2025-2029, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan merupakan cakupan dari Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

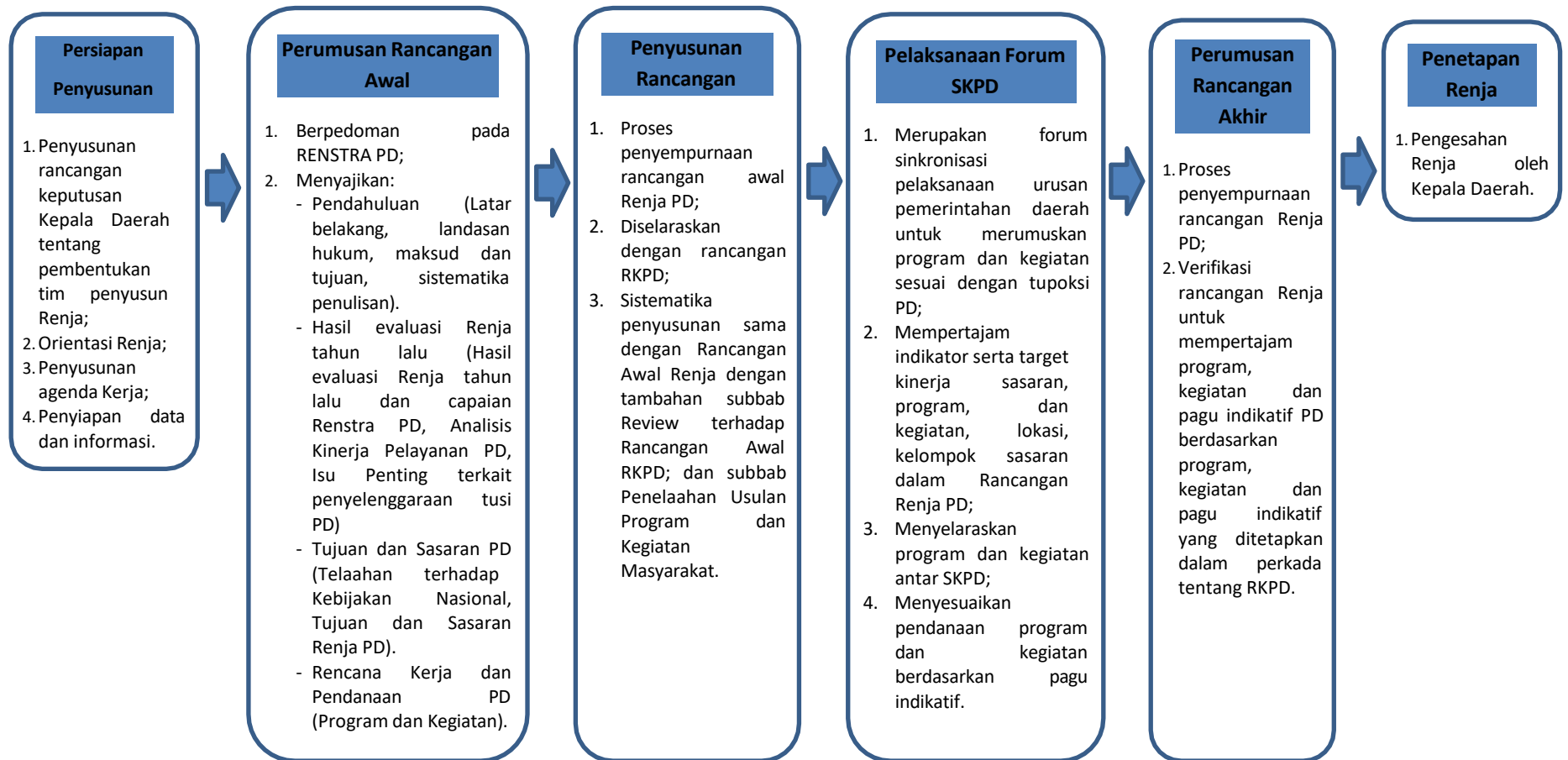
Proses penyusunan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan persiapan penyusunan Renja BKPSDMD yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja BKPSDMD;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja BKPSMD;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja BKPSDMD; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Pemverifikasian oleh Bappeda dan penetapan oleh Peraturan Gubernur terhadap Renja BKPSDMD menjadi pedoman dalam menyusun RKA BKPSDMD pada Tahun Anggaran 2026. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

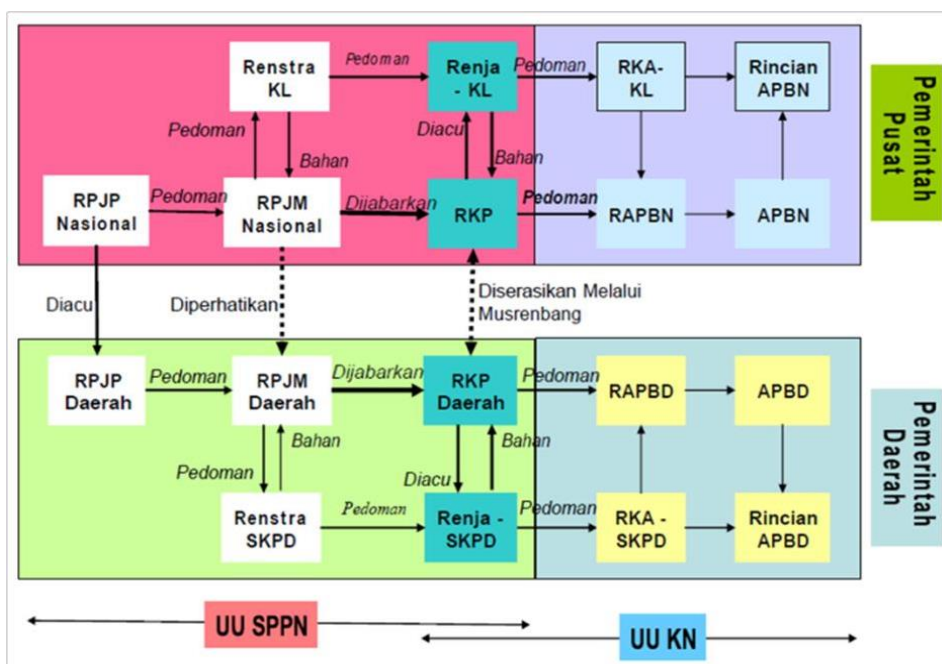


Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan perangkat daerah;
2. memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Rencana Strategis perangkat daerah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah hingga tahun berkenaan.

Gambar 1.2.

Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor..... Seri.)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Renstra BKPSDMD Tahun 2025-2029 ke dalam dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu sekaligus memperkirakan realisasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.
3. Serta mewujudkan Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Didalamnya memuat subbab tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Bab ini berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan tahun 2026.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2026.

BAB V Penutup.

Bab ini berisikan catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sesuai Renstra OPD, serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tingkat capaian kinerja dari BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat diketahui tentunya dengan melakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024, berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) subkegiatan.

Total realisasi secara keseluruhan Belanja BKPSDMD tahun anggaran 2024 yakni 93,84% dengan realiasi fisik sebesar 99,62%. Adapun capaian realisasi kinerja (capaian outcome program dan output kegiatan) pada angka 99,62% berarti realisasi kinerja di antara interval $91 \leq 100\%$ yang merupakan kriteria penilaian kinerja "**SANGAT TINGGI**".

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan
Pencapaian Renstra BKPSDMD s.d. Tahun 2026
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD (BKPSDMD)	82,75	80,61	82,25	80,2	97,51%	82,5	82,5	100%
5	03	01	1.01		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7	7	7	7	100,00%	7	7	100%
5	03	01	1.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	2	100,00%	2	2	100%
5	03	01	1.01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%
5	03	01	1.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	4	100,00%	4	4	100%
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDMD)	86,5	81,5	71	85,77	120,80%	72	72	100%
5	03	01	1.02		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan</i>	86,5	81,5	71	87,75	123,59%	72	72	100%
5	03	01	1.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	101	100	101	101	100,00%	101	101	100%
5	03	01	1.05		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian</i>	86,5	81,5	0	0	0,00%	0	0	0%

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	03	01	1.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	100	0	0	0,00%	0	0	0%
5	03	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,5	81,5	71	83,63	117,79%	72	72	100%
5	03	01	1.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	30	30	30	100,00%	30	30	100%
5	03	01	1.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	7	7	7	100,00%	7	7	100%
5	03	01	1.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	20	20	20	100,00%	20	20	100%
5	03	01	1.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	100,00%	3	3	100%
5	03	01	1.06	0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	5	5	5	100,00%	5	5	100%
5	03	01	1.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%
5	03	01	1.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%
5	03	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	3	3	3	100,00%	3	3	100%
5	03	01	1.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%
5	03	01	1.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%
5	03	01	1.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%
5	03	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	10	10	10	10	100,00%	10	10	100%

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	03	01	1.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	7	7	100,00%	7	7	100%
5	03	01	1.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	100,00%	3	3	100%
5	03	01	1.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	121	121	121	121	100,00%	121	121	100%
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	96,5	0%	0%	0%	0,00%	0%	0%	0%
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	0	100%	86%	75,50%	87,79%	87%	87%	100%
5	03	02	1.01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pegawai Yang Terpenuhi Sesuai Formasi	10	401	86	507	589,53%	87	87	100%
5	03	02	1.01	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%
						Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	0	1	0	0	0,00%	0	0	0%
5	03	02	1.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	12	12	12	100,00%	12	12	100%
						Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi	0	401	0	0	0,00%	0	0	0%
5	03	02	1.01	0004	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1	12	12	12	100,00%	12	12	100%
5	03	02	1.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	12	12	12	100,00%	12	12	100%
						Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun	0	102	0	0	0,00%	0	0	0%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%				
5	03	02	1.01	0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	1	100,00%	1	1	100%		
						Jumlah data dan informasi kepegawaian yang akurat	6358	6100	5360	6358	118,62%	6358	100%	
5	03	02	1.01	0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	12	12	100,00%	12	100%	
5	03	02	1.01	0011	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12	1	12	12	100,00%	12	100%	
						Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	96,25	0	0	0	0,00%	0	0%	
						Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi	0	94,11	95	104,18	109,66%	96	100%	
5	03	02	1.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang di Mutasi dan Promosi	345	385	335	349	104,18%	340	340	100%
5	03	02	1.02	0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	0	1	1	100,00%	1	1	100%
						Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	0	385	0	0	0,00%	0	0	0%
5	03	02	1.02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	0	1	1	100,00%	1	1	100%
						Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	0	366	0	0	0,00%	0	0	0%
						Jumlah ASN yang dikelola kenaikan pangkat	2293	1318	1185	1765	148,95%	1190	1190	100%
5	03	02	1.02	0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	0	1	1	100,00%	1	1	100%
						Jumlah ASN yang Diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	0	1318	0	0	0,00%	0	0	0%
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	31,30	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	0,00	66.97	17,6	22,08	125,45%	28,80	28,80	100%				
5	03	02	1.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1990	4085	915	1404	153,44%	1545	1545	100%
5	03	02	1.03	0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%
5	03	02	1.03	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%
5	03	02	1.03	0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%
					Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	275	513	100	262	262,00%	500	500	100%
						Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	99,91	0	0	0	0,00%	0	0	0%
						Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik	0	99,95	99,87	99,83	99,96%	99,96	99,89	100%
5	03	02	1.04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Terbina	6358	2530	5360	6358	118,62%	6358	6358	100%
5	03	02	1.04	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%
5	03	02	1.04	0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	15	12	15	15	100,00%	3	3	100%
5	03	02	1.04	0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300	634	620	697	112,42%	640	640	100%
5	03	02	1.04	0007	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2500	0	2500	2513	100,52%	2800	2800	100%
						Jumlah ASN yang Dibina Disiplinnya	0	2530	0	0	0,00%	0	0	0%
5	03	02	1.04	0008	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6	3	7	11	157,14%	7	7	100%
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	34,6	0	0	0	0,00%	0	0	0%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Persentase ASN yang meningkatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	0	68,52	75	65,21	86,95%	80	80	100%				
5	04	02	1.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis	2200	3547	3410	666	19,53%	3668	3668	100%
5	04	02	1.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	0	0	0	0,00%	0	0	0%
5	04	02	1.01	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	0	0	0	0,00%	0	0	0%
5	04	02	1.01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2200	3547	3410	666	19,53%	3668	3668	100%
5	04	02	1.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1	0	0	0	0,00%	0	0	0%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
	dan Urusan Pemerintahan Umum													
		Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	3,46	0	0	0	0,00%	0	0	0%				
5	04	02	1.02	<i>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	Jumlah ASN yang tersertifikasi Kompetensi	220	0	0	0,00%	0	0	0%		
					Jumlah sertifikasi kelembagaan yang terselesaikan	0	7	7	100,00%	7	7	0%		
5	04	02	1.02	0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3	1	3	3	100,00%	1	1	100%
5	04	02	1.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kot	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	220	80	120	199	165,83%	120	120	100%
5	04	02	1.02	0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3	3	3	3	100,00%	3	3	100%
5	04	02	1.02	0005	Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%
5	04	02	1.02	0008	Sub Kegiatan Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	5	5	5	100,00%	5	5	100%

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	8,34	0	0	0	0,00%	0	0	0%
						<i>Jumlah ASN Yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Manajerial, dan Fungsional</i>	530	633	610	838	137,38%	620	620	100%
5	04	02	1.02	0007	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	530	633	610	838	137,38%	620	620	100%

Indikator suatu kegiatan dapat terdiri dari beberapa indikator kinerja, dimana target-target indikator kinerja dalam sebuah kegiatan realisasi capaiannya dapat terpenuhi, atau melebihi target, ataupun tidak tercapai. Berikut uraian hasil analisis evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. diatas.

2.1.1. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2024, sebanyak 11 (sebelas) kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran BKPSDMD, dimana realisasi kinerja program/kegiatan/subkegiatan BKPSDMD pada tahun 2024 mencapai 99,62%, artinya program/kegiatan/subkegiatan terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/kegiatan dengan tingkat realisasi yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Kepegawaian Daerah

1. Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan, dengan target 86% dan realisasi 95,6%
 - Jumlah Pegawai Yang Terpenuhi Sesuai Formasi Melalui Pengadaan, dengan target 86 orang dan realisasi 401 orang
 - Jumlah data dan informasi kepegawaian yang akurat, dengan target 5360 orang dan realisasi 6358 orang
2. Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya, dengan target 17,60% dan realisasi 22,08%
 - Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya, dengan target 915 orang dan realisasi 1404 orang
3. Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi, dengan target 95% dan realisasi 104,18%
 - Jumlah ASN yang di Mutasi dan Promosi, dengan target 335 orang dan realisasi 349 orang

- Jumlah ASN yang dikelola kenaikan pangkat, dengan target 1185 orang dan realisasi 1765 orang
- 4. Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik, dengan target 99,87% dan realisasi 99,83%
 - Jumlah ASN yang Terbina, dengan target 5360 orang dan realisasi 6358 orang

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis, dengan target 75%, realisasi 65,21%
 - Jumlah ASN Yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Manajerial, dan Fungsional, dengan target 610 orang dan realisasi 838 orang

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Secara spesifik beberapa faktor penghambat dan pendorong yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

- Sarana dan prasarana yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan seperti komputer pada pelaksanaan CAT, asrama bagi peserta pelatihan.
- Aplikasi yang berbasis online sangat bergantung pada jaringan internet akan berpotensi mengalami kendala pada ASN yang berada di daerah yang sulit dijangkau
- Masih rendahnya kesadaran ASN untuk meningkatkan kinerja dan disiplin
- Belum optimalnya Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan peningkatan kinerja dan disiplin ASN
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi menurut mandatory peraturan yang berlaku

- Masih kurangnya partisipasi dan motivasi dari sebagian ASN terkait pengembangan kompetensi individu
- Belum optimalnya ASN memperbarui data pengembangan kompetensi ke dalam sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan secara mandiri

B. Faktor Pendorong

- Regulasi pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan.
- Keterbukaan informasi dan sistem pelaksanaan yang menggunakan teknologi informasi sehingga tidak memberikan ruang untuk bertindak di luar regulasi.
- Ketersediaan sarana prasarana pendukung
- Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM yang memadai
- Kebijakan dan regulasi Pusat yang mendukung pelaksanaan program kegiatan
- Adanya aplikasi kepegawaian daerah dan pusat dalam kemudahan proses manajemen kepegawaian
- Adanya pelaksanaan Diklat, Bimtek dan Sosialisasi peningkatan kinerja dan disiplin
- Adanya dukungan dari Pimpinan Instansi dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPSDMD.

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan secara umum menyebabkan sisa anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BKPSDMD Tahun Anggaran 2024 namun tidak terlalu signifikan untuk seluruh program pada belanja langsung. Ini terbaca pada laporan realisasi keuangan triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dimana realisasi keuangan BKPSDMD sebesar 93,84% dan SILPA sebesar 6,16%.

Lebih khusus, implikasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Implikasi tidak tercapainya target kinerja program.
 1. Adanya rasionalisasi anggaran karena daerah mengalami deficit sehingga menyebabkan perencanaan anggaran kurang optimal.
 2. Anggaran tidak digunakan dengan optimal.
- b. Implikasi tercapainya target kinerja program
 1. Perencanaan tepat sasaran.
 2. Anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Jabatan struktural dapat terisi sesuai SOTK / kebutuhan.
 4. Kinerja meningkat.
 5. Terselenggaranya peningkatan kompetensi teknis dan fungsional bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Terselenggaranya pendidikan formal PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik penerima beasiswa APBD maupun beasiswa K/L/Sponsor.
 7. Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, promosi dan mutasi pegawai.
- c. Implikasi capaian kinerja program melebihi target.
 1. Terdapat PNS yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan namun belum menduduki jabatan.
 2. Lebih banyak jumlah PNS yang mendapatkan hak diklat 20 jpl/tahun.
 3. Kinerja meningkat.
 4. Pemenuhan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.
 5. Terselenggaranya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, promosi dan mutasi pegawai.

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 kegiatan yang melebihi target justru lebih banyak daripada kegiatan yang tidak memenuhi target. Sebagaimana uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab tidak tercapainya target kegiatan di luar kendali organisasi BKPSDMD. Sehingga BKPSDMD akan semakin memperkuat koordinasi dan konsultasi terkait perkembangan kebijakan baik dari pusat maupun kepala daerah. Adapun kegiatan-kegiatan yang capaiannya melebihi target dipandang perlu mendapat perhatian sehingga dalam perencanaan di masa yang akan datang dapat ditetapkan target yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Penyesuaian perlu dilakukan untuk meminimalkan kesenjangan antara target kinerja dan realisasi capaian kinerja program/kegiatan.

Lebih jelas, kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai berikut:

- a. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi tidak tercapainya kinerja program RENSTRA BKPSDMD.
 1. Penguatan kewenangan lembaga diklat sehingga peningkatan kompetensi ASN lebih maksimal.
 2. Mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas dalam mengatasi minimnya anggaran
- b. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi tercapainya kinerja program RENSTRA BKPSDMD.
 1. Akan dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
- c. Kebijakan/tindakan yang akan diambil sebagai implikasi realisasi kinerja program RENSTRA BKPSDMD melebihi target.
 1. Melakukan evaluasi kinerja dan penyesuaian target capaian.
 2. Mengembangkan indikator kinerja agar cakupan layanan menjadi lebih luas.

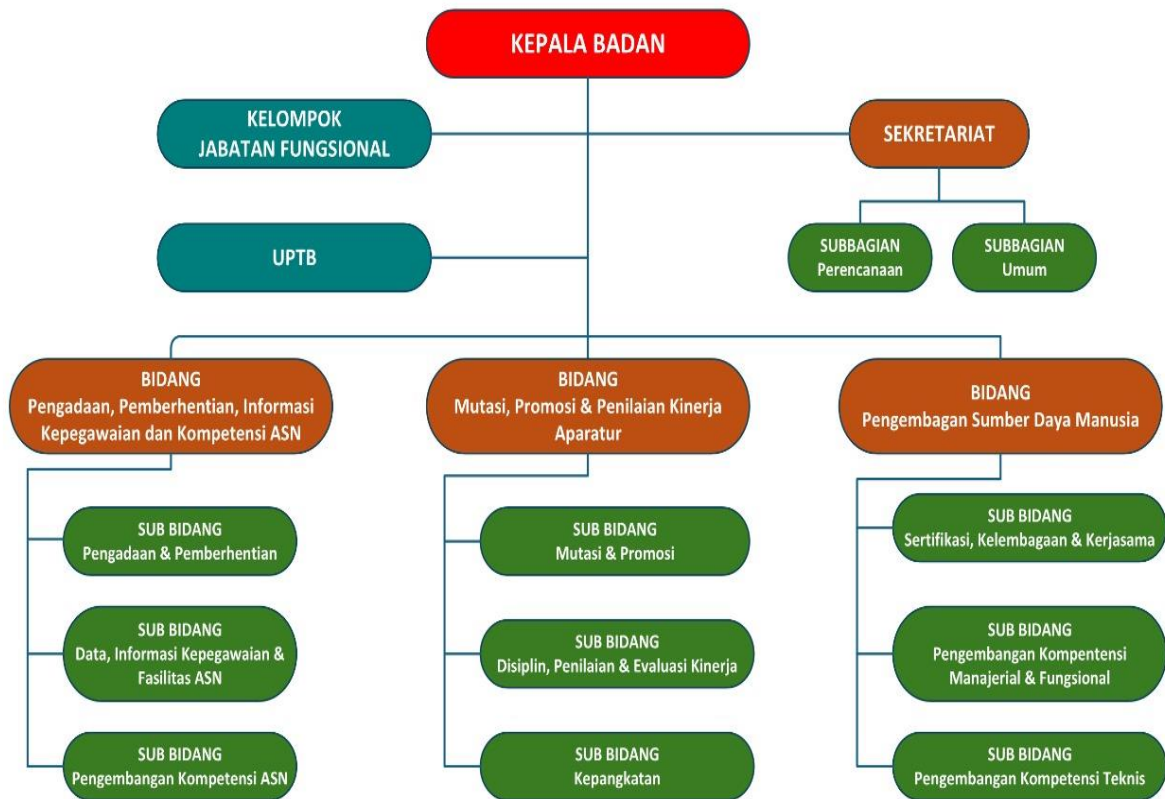
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut diatas, susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi dan Profesi ASN, membawahi :
 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Subbidang Data, Informasi Kepegawaian dan Fasilitas ASN;
 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi ASN

- d. Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, membawahi:
 - 1. Subbidang Mutasi dan Promosi;
 - 2. Subbidang Disiplin, Penilaian dan Evaluasi Kinerja
 - 3. Subbidang Kepangkatan
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - 1. Subbidang Sertifikasi, kelembagaan dan Kerjasama
 - 2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2024, BKPSDMD didukung pegawai sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang. Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin Pertanggal 31 Desember 2024

No.	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JABATAN		
		Laki-Laki	Perempuan	STRUKTURAL	JFU	JFT
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	50	41	7	21	63
TOTAL		91		91		

Sumber : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN

Tabel 2.3.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Pertanggal 31 Desember 2024

No.	INSTANSI	TINGKAT PENDIDIKAN										GOLONGAN					
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	IX	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	35	39	6	4	-	-	5	-	-	33	48	5	-	5	-
TOTAL		2	35	39	6	4	-	-	5	-	-	33	48	5	-	5	-
91												91					

Sumber : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja BKPSDMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis BKPSDMD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Indikator Kinerja Utama BKPSDMD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	-2	-3	-4	-5	-6				
1	Terwujudnya implementasi meritokrasi dalam manajemen ASN	Indeks meritokrasi dalam manajemen ASN	Meningkatnya Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan, Kinerja dan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi standar kinerja, kualifikasi, pendidikan, potensi, integritas dan moralitas	97,15%	97,25%	97,35%	97,45%	97,55%
			Meningkatnya meritokrasi dalam manajemen ASN dengan prinsip kompetensi aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	86,25%	86,45%	86,65%	86,85%	87,05%
		Nilai Penerapan RB PD	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah	Nilai kinerja organisasi perangkat daerah	98,91%	98,92%	98,93%	98,95%	98,96%

Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel di atas memiliki definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama BKPSDMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
-1	-2	-3
1	Persentase ASN yang memenuhi standar kinerja, kualifikasi, pendidikan, potensi, integritas dan moralitas	Rata-rata ((Jumlah ASN berpendidikan tinggi/jumlah seluruh ASN x 100%) + (Jumlah ASN dengan penilaian kinerja minimal BAIK/jumlah seluruh ASN x 100%) + (Jumlah ASN tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/jumlah seluruh ASN x 100%) + (Jumlah ASN yang memenuhi standar potensi/jumlah seluruh ASN x 100%))
2	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	Jumlah ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan / Jumlah seluruh ASN x 100%
3	Nilai kinerja organisasi perangkat daerah	<p>Nilai Akhir Indikator = Normalisasi capaian x (100% - Besaran kooreksi AKIP)</p> <p>Total PK = \sum (Nilai Akhir Indikator 1 + Nilai Akhir Indikator 2)</p> <p>NKO = Total PK : Jumlah Indikator</p>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan teknik penghitungan realisasi capaian IKU BKPSDMD yaitu:

1. Persentase ASN yang memenuhi standar kinerja, kualifikasi pendidikan, potensi, integritas dan moralitas.

Capaian ini dihitung melalui penginputan Indeks Meritokrasi dalam Manajemen ASN terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi beberapa aspek dalam sistem merit yang mencakup kinerja, kualifikasi pendidikan, potensi, integritas dan moralitas.

2. Persentase ASN yang memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan

Capaian ini dapat dihitung melalui perbandingan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi meliputi pelatihan teknis, manajerial dan fungsional terhadap jumlah seluruh ASN.

3. Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Merupakan nilai yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama dan yang telah ditetapkan. Nilai ini diperoleh dari nilai akhir capaian masing-masing indikator dikalikan 100%.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 3 (tiga) program yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Kepegawaian Daerah; dan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Capaian Indikator Program (outcome) selama 5 (lima) tahun terkait urusan kepegawaian dan urusan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Program (outcome)

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	Analisa
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn +2)	(Thn n+3)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip PD (BKPSDM)			82,5	82,75	83	83,25	83,50			82,75	
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM)			86	86,5	87	88	89		87,02	86,5	
3	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi			96	96,5	97	97,5	98			96,5	
4	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya			96	96,2	96,5	96,75	97			96,2	
5	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			28,8	31,3	33,8	36,3	38,8			31,3	
6	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik			99,89	99,91	99,92	99,94	99,95			99,91	
7	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan								95,6	99,03		
8	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi promosi								104,18	96,13		
9	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya								22,08	17,42		
10	Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik								99,83	98,45		

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	Analisa
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn +2)	(Thn n+3)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
11	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis			31,46	34,6	37,75	40,89	44,04			34,6	
12	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi			1,89	3,46	3,62	3,77	3,93			3,46	
13	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsiona			5,98	8,34	8,65	9,28	10,03			8,34	
14	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis								65,21	79,93		

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah perlu dilakukan identifikasi permasalahan sebagai strategi untuk mengetahui isu strategis dalam pelaksanaan tupoksi BKPSDMD, sekaligus meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang dalam mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di suatu instansi pemerintah ditentukan oleh ASN sebagai faktor kunci. Kualitas ASN yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kualitas ASN dapat dilihat melalui kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing ASN. Perlu dilakukan pengelolaan kompetensi pegawai melalui peningkatan kompetensi secara sistematis dan berkesinambungan agar kedepannya kualitas ASN dapat terus terjaga dan meningkat dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN dengan cara melakukan pengembangan kompetensi ASN dan menguatkan sistem reward & punishment.
2. Peningkatan kompetensi atau kualifikasi pendidikan pegawai dengan cara pengiriman tugas belajar / ijin belajar dan pelatihan teknis maupun fungsional sesuai dengan Rencana Pengembangan Kompetensi (Renbangkom) berdasarkan hasil analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi pegawai;
3. Pemetaan kompetensi pegawai dalam rangka implementasi manajemen talenta dan peningkatan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN
4. Penataan jabatan fungsional sesuai dengan amanat peraturan perundangan serta melakukan pembinaan jabatan fungsional;
5. Meningkatkan disiplin, kinerja, integritas dan netralitas ASN.

2.3.1. Sinergi Program Pusat dan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita, yaitu :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden ke-7 yaitu memperkuat reformasi birokrasi salah satunya melalui penataan SDM aparatur, diantaranya manajemen talenta dan penerapan sistem merit pada instansi pemerintah di bidang kepegawaian. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pada tahap ke-I (2025-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 yaitu **Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi** dengan arah kebijakan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masih ditemukan beberapa permasalahan dan hambatan, sebagai berikut:

- 1) Penjaminan mutu kediklatan.

Penggabungan unit kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Sekretariat KORPRI mengakibatkan kewenangan pelaksanaan fungsi dan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi terbatas.

- 2) Kedisiplinan dan kinerja ASN belum optimal.

Setiap tahun masih ada ASN yang mendapat hukuman disiplin baik ringan, sedang dan berat, selain itu juga kedisiplinan waktu kerja ASN juga belum optimal.

- 3) Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi.

Beberapa aplikasi kepegawaian masih belum optimal sehingga administrasi masih banyak menggunakan kertas. Dengan aplikasi kepegawaian yang lebih optimal, diharapkan program paperless dapat mendorong pencapaian reformasi birokrasi dan penataan arsip. Saat ini juga aplikasi masih bersifat sektoral belum terintegrasi dengan baik. Banyaknya aplikasi yang harus

ditangani dan diremajakan berdampak pada besarnya sumber daya (manusia, waktu, anggaran) yang harus dikeluarkan setiap tahun.

4) Belum optimalnya perencanaan ASN.

Perencanaan ASN belum optimal karena rencana kebutuhan pegawai lima tahunan belum sesuai dengan rencana strategis organisasi; Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan belum berbasis TI; serta belum adanya metode yang jelas dan terstruktur dalam menentukan rencana distribusi pegawai.

5) Belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun.

Sejak lembaga pelayanan KORPRI bergabung dengan lembaga pelayanan kediklatan dan kepegawaian dalam 1 (satu) unit kerja BKPSDMD, program/kegiatan pembinaan KORPRI hampir tidak mendapat peluang dari segi penganggaran. Padahal anggota KORPRI adalah seluruh ASN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa program/kegiatan pembinaan seperti bakti sosial KORPRI, bimbingan teknis bagi anggota yang memasuki masa pensiun, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan.

6) Belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN.

7) Adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang seringkali mempengaruhi keberlangsungan program-program kepegawaian di pemerintah daerah.

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDMD

Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDMD yakni sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Keinginan Kepala Daerah untuk menjadi yang terdepan dan rujukan penyelenggaraan kediklatan di wilayah barat Indonesia:
- 2) Tuntutan digitalisasi dalam manajemen ASN.

b. Peluang

- 1) Pemberlakuan UU Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara

- 2) SMART ASN (ASN yang memiliki karakteristik berwawasan global, menguasai teknologi dan informasi serta bahasa, memiliki kemampuan jejaring atau networking tinggi dengan kemampuan skill multitasking yang proporsional):
- 3) Kerjasama dengan pihak ketiga (baik swasta maupun pemerintahan) dalam pengembangan SDM;
- 4) Prioritas Pusat dalam pengembangan kompetensi ASN berupa kebijakan pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah.

2.4. Review Terhadap RKPD

Proses membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDMD yang akan dituangkan ke dalam usulan program/kegiatan/subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan pada Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026. Program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun proses review ini dilakukan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa analisis kebutuhan BKPSDMD dalam Renja sesuai dengan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.7
Review terhadap RKPD tahun 2026
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN KEPEGAWAIAN					URUSAN KEPEGAWAIAN					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah		Nilai Sakip PD (BKPSDM)	82,75	22.656.320.636			Nilai Sakip PD (BKPSDM)	82,75	22.656.320.636	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	148.943.392	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	148.943.392	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	115.910.258	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	115.910.258	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15.646.595	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15.646.595	
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	17.386.539	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	17.386.539	
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat daerah (BKPSDM)	86.5	22.506.320.636			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM)	86.5	22.506.320.636	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	86.5	18.078.026.952	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	86.5	18.078.026.952	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	18.078.026.952	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	18.078.026.952	
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.5	606.097.447	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.5	606.097.447	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kep. Babel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	126.092.310	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kep. Babel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	126.092.310	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kep. Babel	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	7	28.977.565	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kep. Babel	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	7	28.977.565	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	57.955.129	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	57.955.129	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	5.795.513	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	5.795.513	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Prov. Kep. Babel	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	157.865.387	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Prov. Kep. Babel	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	157.865.387	
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	11.591.026	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	11.591.026	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	217.820.517	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	217.820.517	
IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	2.780.060.522	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	2.780.060.522	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	13.909.231	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	13.909.231	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	579.551.291	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	579.551.291	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.186.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.186.600.000	
V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	10	1.043.192.323	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	10	1.043.192.323	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	231.820.516	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	231.820.516	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Kep. Babel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	579.551.291	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Kep. Babel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	579.551.291	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kep. Babel	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	121	231.820.516	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kep. Babel	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	121	231.820.516	
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			96,5 %	2.597.370.705	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			96,5 %	2.597.370.705	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	96,50	2.597.370.705	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	96,50	2.597.370.705	
I	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat	6358	923.357.907	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat	6358	923.357.907	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1		
			Jumlah Pegawai Yang Terpenuhi Sesuai Formasi Melalui Pengadaan	10				Jumlah Pegawai Yang Terpenuhi Sesuai Formasi Melalui Pengadaan	10		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.	1	25.361.164	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.	1	25.361.164	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	99.303.722	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	99.303.722	
3	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1	17.015.626	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1	17.015.626	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	38.606.652	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	38.606.652	
5	Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	615.569.459	Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	615.569.459	
6	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	69.546.155	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	69.546.155	
7	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12	57.955.129	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12	57.955.129	
	Meningkatnya Tata Kelola Karir ASN		Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	96,25	2.597.370.705	Meningkatnya Tata Kelola Karir ASN		Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	96,25	2.597.370.705	
II	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dikelola kenailakan pangkat	1193	930.726.676	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dikelola kenailakan pangkat	1193	930.726.676	
			Jumlah ASN yang di Mutasi dan Promosi	345				Jumlah ASN yang di Mutasi dan Promosi	345		
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	92.403.658	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	92.403.658	
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	111.088.391	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	111.088.391	
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	727.234.627	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	727.234.627	
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	31.30	2.597.370.705	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	31.30	2.597.370.705	
III	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	1990	357.826.558	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	1990	357.826.558	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	103.391.951	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	103.391.951	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	57.955.129	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	57.955.129	
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	173.856.387	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	173.856.387	
4	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	275	22.614.091	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	275	22.614.091	
	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,91	2.597.370.705	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,91	2.597.370.705	
IV	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang Terbina	6358	385.459.564	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang Terbina	6358	385.459.564	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	57.955.129	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	57.955.129	
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	15	169.043.521	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3	169.043.521	
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300	38.182.052	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300	38.182.052	
4	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2500	73.914.759	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2500	73.914.759	
5	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6	46.364.103	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6	46.364.103	
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			34,60 %	936.760.498	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			34,60 %	936.760.498	
	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	34.60	936.760.498	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	34.60	936.760.498	
I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis	2200	315.940.626	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis	2200	315.940.626	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prov. Kep. Babel	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	9.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prov. Kep. Babel	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	9.000.000	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prov. Kep. Babel	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	9.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prov. Kep. Babel	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	9.000.000	
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2200	292.940.626	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2200	292.940.626	
4	Sub Kegiatan Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1	5.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1	5.000.000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
	Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi		Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	3.46	936.760.498	Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi		Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	3.46	936.760.498	
II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Sertifikasi Pelatihan Manajerial dan Fungsional	530	620.819.872	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN Yang Mendapatkan Sertifikasi Pelatihan Manajerial dan Fungsional	530	620.819.872	
			Jumlah ASN Yang Tersertifikasi Kompetensi	220				Jumlah ASN Yang Tersertifikasi Kompetensi	220		
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3	17.386.539	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3	17.386.539	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	220	44.660.222	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	220	44.660.222	
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3	88.009.814	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3	88.009.814	
4	Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1	11.591.026	Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1	11.591.026	
	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	8.34	936.760.498	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	8.34	936.760.498	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	530	389.122.328	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prov. Kep. Babel	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	530	389.122.328	
	Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	3.46	936.760.498	Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	3.46	936.760.498	
6	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	70.049.943	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	70.049.943	
	TOTAL				26.190.450.839	TOTAL				26.190.450.839	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat umum. Sasaran program/kegiatan/subkegiatan BKPSDMD adalah Aparatur Sipil Negara. Khususnya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan umumnya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur. Namun pelayanan yang dimiliki BKPSDMD seperti fasilitas ruang pertemuan/aula, ruang belajar/kelas, penginapan/asrama/paviliun diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan memiliki anggaran masing-masing. Pemanfaatan fasilitas inilah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui BKPSDMD.

Adapun usulan program dan kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang terkait dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang diinput dalam aplikasi SIPD-RI disajikan dalam tabel 2.8 dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Renja Tahun 2026

No.	Permasalahan	Usulan	Rekomendasi
1.	Banyaknya jabatan kosong di birokrasi perlu diisi dengan penempatan pejabat yang benar	Belum optimalnya pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang kosong dilakukan melalui seleksi terbuka, sedangkan jabatan administrator dan

			pengawas melalui manajemen talenta
2.	Penambahan dokter spesialis jantung di RSUD Provinsi	Belum optimalnya pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	Terdapat 1 (satu) orang dokter spesialis jantung di RSUD
3.	Penyiapan dokter-dokter sub spesialis di RSUD Ir. Soekarno	Belum optimalnya pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	Terdapat 4 orang dokter subspesialis (kesehatan anak 2 orang, subspesialis jantung 1 orang, subspesialis intensive care 1 orang) dan 8 orang dokter mitra di RSUD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD



3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dalam dokumen Rencana Strategis BKPSDMD Tahun 2023-2026 dan merupakan tahun transisi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Proses dan tahapan penyusunan Renja BKD tahun 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja BKPSDMD Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2026, masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD dan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDMD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari misi. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 terkait dengan aparatur yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalitas aparatur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN).

Sasaran dalam RPJMD Provinsi tersebut sejalan dengan sasaran dalam Renstra BKPSDMD. Ada 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan profesionalitas aparatur yaitu :

1. Meningkatnya Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi, Kinerja, dan Disiplin Aparatur;

Salah satu upaya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu dengan melihat kesesuaian kualifikasi pendidikan, tingkat kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kualifikasi pendidikan diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); Pendidikan S-2 (Strata-Dua); Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat); Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga); Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-1 (Diploma-Satu) / SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah dicapai, serta tingkat kinerja dan disiplin pegawai maka diharapkan akan meningkatkan profesionalitas aparatur.

2. Meningkatnya Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Aparatur;

Upaya lainnya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu meningkatkan kompetensi yang diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi Diklat Kepemimpinan; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka diharapkan dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

Hubungan antara tujuan sasaran RPJMD dan tujuan-sasaran BKPSDMD Tahun 2026 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Tujuan Sasaran RPJMD dan Tujuan Sasaran BKPSDMD
beserta Target pada Renja Tahun 2026

NO.	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH		RENSTRA			TARGET				
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	Terwujudnya Implementasi Meritokrasi Dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN dengan prinsip Kinerja, Kualifikasi, Potensi, Integritas dan Moralitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar Kinerja, Kualifikasi Pendidikan, Potensi, Integritas dan Moralitas	97,15	97,25	97,35	97,45	97,55
				Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN dengan prinsip Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan	86,25	86,45	86,65	86,85	87,05
				Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	98,92	98,93	98,94	98,95	98,96

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



4.1. Rencana Kerja

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) yaitu meningkatkan profesionalitas ASN melalui peningkatan standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin aparatur serta kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan dan subkegiatan. Indikator program/kegiatan/subkegiatan (*outcome/output/suboutput*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing bidang di lingkungan BKPSDMD yang disusun ke dalam rencana kerja tahun 2026.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2026 terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) subkegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program, yaitu:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - f. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a. Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - c. Subkegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
 - d. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - e. Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

- f. Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- g. Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN
- 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Subkegiatan Pengelolaan Assesment Center
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - d. Subkegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
 - d. Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN
 - e. Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat

Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- d. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - a. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - b. Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
 - d. Subkegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - e. Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
 - f. Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

4.2. Pendanaan

Penyelenggaraan program/kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan dukungan pendanaan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun
2027 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							
	URUSAN KEPEGAWAIAN							
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.656.320.636			23.946.703.844
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip PD (BKPSDM)		82,75	148.943.392		83	93.353.456
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	148.943.392		7	93.353.456
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	2	115.910.258	APBD	2	73.623.396
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kep. Babel	1	15.646.595	APBD	1	10.000.000
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kep. Babel	4	17.386.539	APBD	4	9.730.060

	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM)		86,5	22.656.320.636		87	23.946.703.844
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan		86,5	18.078.026.952		87	18.460.501.867
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kep. Babel	101	18.078.026.952	APBD	101	18.460.501.867
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan		86,5	606.097.447		87	363.255.563
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Kep. Babel	30	126.092.310	APBD	30	77.840.478
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov. Kep. Babel	7	28.977.565	APBD	7	16.216.766
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Kep. Babel	20	57.955.129	APBD	20	32.433.532
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov. Kep. Babel	3	5.795.513	APBD	3	3.243.353
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Prov. Kep. Babel	5	157.865.387	APBD	5	97.300.597
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Prov. Kep. Babel	12	11.591.026	APBD	12	6.486.706
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kep. Babel	12	217.820.517	APBD	12	129.734.131
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan		0	0		101	1.700.000.000

1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0		100	1.700.000.000
IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3	2.780.060.522		3	2.745.789.373
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kep. Babel	12	13.909.231	APBD	12	7.784.048
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kep. Babel	12	579.551.291	APBD	12	324.335.325
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kep. Babel	12	2.186.600.000	APBD	12	2.413.670.000
V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara		10	1.043.192.323		10	583.803.585
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Kep. Babel	7	231.820.516	APBD	7	129.734.130
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kep. Babel	3	579.551.291	APBD	3	324.335.325
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kep. Babel	121	231.820.516	APBD	121	129.734.130
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.597.370.705			1.403.204.349
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi		96,5	2.597.370.705		97	1.403.204.349

I	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat		6358	923.357.907		6359	464.694.680
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi		1		1		
		Jumlah Pegawai Yang Terpenuhi Sesuai Formasi Melalui Pengadaan		10		10		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Prov. Kep. Babel	1	25.361.164	APBD	1	14.192.914
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Prov. Kep. Babel	1	99.303.722	APBD	1	42.701.989
3	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Prov. Kep. Babel	1	17.015.626	APBD	1	9.522.485
4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Prov. Kep. Babel	1	38.606.652	APBD	1	16.009.192
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Prov. Kep. Babel	1	615.569.459	APBD	1	310.914.329
6	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Kep. Babel	1	69.546.155	APBD	1	38.920.239
7	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Prov. Kep. Babel	12	57.955.129	APBD	12	32.433.532
	Meningkatnya Tata Kelola Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya		96,25	2.597.370.705		96,50	1.403.204.349
II	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN Yang Dikelola Kenailakan Pangkat		1193	930.726.676		1196	522.543.128
		Jumlah ASN Yang Di Mutasi Dan Promosi		345		350		

1	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Prov. Kep. Babel	1	92.403.658	APBD	1	51.712.024
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Prov. Kep. Babel	1	111.088.391	APBD	1	62.168.595
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Prov. Kep. Babel	1	727.234.627	APBD	1	408.662.509
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		31.30	2.597.370.705		31,80	1.403.204.349
III	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1990	357.826.558		2149	200.051.117
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Prov. Kep. Babel	1	103.391.951	APBD	1	57.861.424
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Prov. Kep. Babel	1	57.955.129	APBD	1	32.433.532
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Prov. Kep. Babel	1	173.856.387	APBD	1	97.300.597
4	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Prov. Kep. Babel	275	22.614.091	APBD	289	12.655.564
	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		99.91	2.597.370.705		99.92	1.403.204.349
IV	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Terbina		6358	385.459.564		6358	215.715.424
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Kep. Babel	1	57.955.129	APBD	1	32.433.532
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Prov. Kep. Babel	15	169.043.521	APBD	15	94.602.128

3	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Prov. Kep. Babel	300	38.182.052	APBD	300	12.973.413
4	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Prov. Kep. Babel	2500	73.914.759	APBD	2500	49.759.525
5	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Prov. Kep. Babel	6	46.364.103	APBD	5	25.946.826
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				936.760.498			550.543.637
	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis		34.60	936.760.498		37.75	550.543.637
I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis		2200	315.940.626		2400	186.324.157
1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Prov. Kep. Babel	1	9.000.000	APBD	1	5.000.000
2	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Prov. Kep. Babel	1	9.000.000	APBD	1	5.000.000

3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Prov. Kep. Babel	2200	292.940.626	APBD	2400	171.324.157
4	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Prov. Kep. Babel	1	5.000.000	APBD	1	5.000.000
	Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi		3.46	936.760.498		3.62	550.543.637
II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Sertifikasi Pelatihan Manajerial dan Fungsional		530	620.819.872		550	364.219.480
		Jumlah ASN Yang Tersertifikasi Kompetensi		220			230	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Prov. Kep. Babel	3	17.386.539	APBD	3	9.730.060
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Prov. Kep. Babel	220	44.660.222	APBD	230	24.993.280
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Prov. Kep. Babel	3	88.009.814	APBD	3	60.445.727

4	Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Prov. Kep. Babel	1	11.591.026	APBD	1	6.486.706
	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional		8.34	936.760.498		8.65	550.543.646
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prov. Kep. Babel	530	389.122.328	APBD	550	217.765.224
	Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		3.46	936.760.498		3.62	550.543.646
6	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prov. Kep. Babel	2	70.049.943	APBD	5	44.798.492
TOTAL					26.190.450.839			25.900.451.839

BAB V

PENUTUP



5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara efektif dan efisien, disamping itu Renja ini dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

Sebagai upaya penanganan isu strategis pembangunan tahun 2026 maka BKPSDMD memiliki program prioritas sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah; dan
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Kedua program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dan 2024;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;

5. Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra BKPSDMD selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulanan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Pangkalpinang, Oktober 2025
PLT. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Des. YUMNA HELMI, M.Si
PENYUSUN UTAMA MADYA
NIP. 49600505 199203 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka-Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418
Website : bkpsdmd.babelprov.go.id